

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada 17 Desember 2014 Pemerintah Amerika Serikat melalui Presiden Obama dan Pemerintah Kuba melalui Presiden Raul Castro, mengumumkan bahwa telah tercapai sebuah kesepakatan untuk memulai upaya normalisasi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Kuba. Kesepakatan ini menjadi perhatian dunia karena lebih dari 50 tahun kedua negara tidak lagi memiliki hubungan diplomatik. Hal tersebut terjadi semenjak Pemerintahan Dwight D. Eisenhower menutup kedutaan di Havana pada tahun 1961 sebagai bentuk respon dari kebijakan nasionalisasi aset Amerika Serikat oleh Pemerintahan Fidel Castro pasca peristiwa Revolusi Kuba.¹

Jika dilihat dari historisnya, hubungan kedua negara dimulai pasca disepakatinya Perjanjian Paris di tahun 1763 antara Amerika Serikat dan Spanyol. Perjanjian itu berisi penyerahan beberapa wilayah jajahan Spanyol di Amerika Selatan (termasuk Kuba) pasca kekalahan Spanyol dalam *Anglo-Spanish War*.²³ Sampai pada tahun 1903, Kuba memperoleh kemerdekaannya secara penuh dan berdaulat dari Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1923, kedua negara sepakat memulai hubungan diplomatik dengan membuka kedutaan di masing-masing negara dan setelah itu terjadi tren peningkatan kerjasama dan perdagangan antara

¹ William M. LeoGrande, *No Time to Lose: Navigating the Shoals of the New U.S.-Cuba Relationship*, Institute of Latin American Studies. New York. 2016

² Matthew Lange, James Mahoney dan Matthias vom Hau, *Colonialism and Development: A Comparative Analysis of Spanish and British Colonies*, 111 Am. J. Soc.

³ James H. Hitchman dan Leonard Wood, *Cuban Independence 1898–1902*, Springer, The Hague.

keduanya. Dimana hampir 80% hasil produksi Kuba diekspor ke Amerika Serikat dan bagi Amerika Serikat, Kuba merupakan wilayah dengan iklim investasi yang sangat baik dibanding negara lain di kawasan tersebut.⁴ Konflik muncul ketika Fidel Castro menyulut perlawanan terhadap Pemerintahan Kuba saat itu, Fulgencio Batista karena dianggap sebagai pemimpin diktator dan cenderung pro terhadap kepentingan Amerika Serikat di Kuba. Situasi diperburuk dengan meningkatnya angka pengangguran dan praktek korupsi yang dilakukan oleh Pemerintahan Batista. Hampir 70% dari tanah subur di Kuba dimiliki oleh investor Amerika Serikat yang digunakan sebagai lahan produksi mereka.⁵ Maka di tahun 1959, terjadi Revolusi Kuba yang dipimpin oleh Fidel Castro yang berhasil menggulingkan Pemerintahan Batista. Revolusi ini merupakan reaksi terhadap distorsi demokrasi, kediktatoran, dan pengaruh kuat kekuatan asing pada masyarakat dan ekonomi Kuba.

Pasca peristiwa revolusi tersebut, Fidel Castro diangkat menjadi pemimpin baru Kuba. Castro menyiapkan seperangkat kebijakan baru untuk menata ulang sistem di negaranya yang dulunya cenderung liberal menjadi sistem sosialis. Kebijakan pertama yang diambilnya dengan mengeluarkan Undang-Undang Reformasi Agraria yaitu menaikkan tarif impor barang dan produk dari Amerika Serikat, klaim lahan privat menjadi milik negara serta menasionalisasi aset dan properti Amerika Serikat seperti: lahan pertanian dan perkebunan, ladang minyak, pertambangan dan pabrik tanpa adanya kompensasi dari Pemerintah Kuba.⁶ Akibat

⁴ U.S. Embassy in Cuba, "Brief Diplomatic History", <https://cu.usembassy.gov/our-relationship/policy-history/> (Diakses pada 18 November 2018).

⁵ Tijana Radeska, "Fulgencio Batista – One of the Worst and Most Cowardly Dictators in History", *the Vintage News*. <https://www.thevintagenews.com/2017/05/18/fulgencio-batista-one-of-the-worst-and-most-cowardly-dictators-in-history/> (Diakses pada 20 November 2018).

⁶ Josipa Rajevac, "US-Cuba Rapprochement". *Prihvaceno*: 29. VIII.

dari kebijakan tersebut, Amerika Serikat mengalami kerugian sekitar \$8 miliar, baik kepemilikan individu ataupun swasta. Tinjauan Hukum Antar-Amerika menggambarkan bahwa kebijakan nasionalisasi aset Amerika Serikat oleh Fidel Castro sebagai "perampasan" aset dan properti terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dengan status tanpa kompensasi. Merespon kebijakan "penjarahan" besar-besaran tersebut Presiden Amerika Serikat saat itu, Dwight D. Eisenhower, mendesak Kongres untuk segera menyetujui penghentian semua bentuk kerjasama diplomatik dan ekonomi dengan Kuba. Kemudian direalisasikan dengan menutup kedutaan Amerika Serikat di Havana tahun 1961 yang secara langsung memutuskan hubungan diplomatik kedua negara.⁷

Di era pemerintahan Kennedy, Amerika Serikat melakukan kebijakan agresif dengan melakukan invasi terhadap Kuba melalui Teluk Babi pada tahun 1961. Kemudian, pada tahun 1962, Amerika Serikat melakukan embargo penuh⁸ terhadap Kuba sebagai respon terhadap diizinkan Uni Soviet mendirikan pangkalan militer di wilayah Kuba dengan mengarahkan misil ke Florida.⁹ Kebijakan tersebut dianggap sebagai sanksi yang pantas bagi Kuba disebabkan oleh tindakan Fidel Castro yang sudah terlalu jauh dan mengancam keamanan Amerika Serikat. Selain itu, dengan adanya kebijakan embargo tersebut diharapkan dapat mengubah sistem sosialis yang dianggap merugikan masyarakat Kuba kembali

⁷ Geoffrey Warner, *Reviewed Works: Foreign Relations of the United States 1958-1960*, Vol. V. American Republics: Foreign Relations of the United States 1958-1960. Vol. VI. Cuba. Oxford University Press (1999)

⁸ Menurut Alvarez, embargo merupakan suatu kebijakan biasanya berupa sanksi yang dilakukan oleh suatu negara kepada negara lain dalam konteks ekonomi/ komersil dimana bertujuan untuk menghentikan kekerasan di negara target/ ingin mengubah kebijakan negara target. Dalam kebijakan embargo (penuh) terdapat beberapa kriteria seperti: larangan suplai senjata dan amunisi, menghambat dukungan militer dan pendampingan ekonomi, dan boikot sistem keuangan dan komersil negara tujuan.

⁹ Donald L. Hafner, "Bureaucratic Politics and 'Those Frigging Missiles': JFK, Cuba and U.S. Missiles in Turkey", *ORBIS A Quarterly Journal of World Affairs*

pada sistem demokratis seperti sebelumnya. Di Era Pemerintahan Reagan, hubungan kedua negara semakin memburuk. Di tahun 1982, Amerika Serikat memasukkan Kuba dalam daftar negara sponsor terorisme.¹⁰ Lalu pasca runtuhnya Uni Soviet di tahun 1991, Pemerintahan George H.W Bush menandatangani the Cuban Democracy Act (the Torricelli Act) berisi penguatan sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Kuba berupa pelarangan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat melakukan transaksi ekonomi dengan Kuba. Bush menyatakan bahwa, "Hubungan erat antara Kuba dengan Uni Soviet telah berakhir dan kami memastikan bahwa tidak ada pemerintah lain yang akan membantu rezim Fidel Castro".¹¹ Bush juga menyatakan bahwa Amerika Serikat hanya akan melakukan normalisasi hubungan diplomatik jika Kuba menerapkan sistem demokrasi di negaranya.¹² Kemudian di tahun 1996, Pemerintahan Bill Clinton mengeluarkan kebijakan the Helms-Burton Act yang berisi himbauan untuk dunia internasional untuk memangkas bantuan ekonomi kepada Kuba, dan mencoba untuk menarik aset Amerika Serikat yang ada di Kuba.¹³

Lalu kebijakan Amerika Serikat mulai menunjukkan perubahan ketika masa Pemerintahan Barack Obama dimulai pada tahun 2009. Mengawali tahun pemerintahannya, Obama mengeluarkan kebijakan "reaching out to the Cuban People" yaitu seperangkat kebijakan untuk merangkul masyarakat Kuba demi mewujudkan keinginan mereka untuk bebas menentukan masa depan mereka sendiri. Kebijakan tersebut salah satunya adalah menciptakan interaksi langsung

¹⁰ Claire Felter dan Danielle Renwick, "U.S.-Cuba Relations", *Council on Foreign Policy*. <https://www.cfr.org/backgrounder/us-cuba-relations> (Diakses pada 29 Desember 2018)

¹¹ Amnesty International, "The US Embargo against Cuba". *Amnesty International Publications*.

¹² William M. LeoGrande dan Peter Kornbluh, *Back Channel to Cuba: The Hidden History of Negotiations between Washington and Havana*. The University of North Carolina Press Chapel

¹³ Amnesty International: 10

antara masyarakat Kuba dan Amerika Serikat dengan mengundang para seniman dan akademis Kuba untuk mengunjungi universitas-universitas di Amerika Serikat dan juga menggelar pertunjukan budaya. Kemudian untuk pertama kalinya, Obama juga membuka penerbangan langsung dari tiga kota besar Amerika Serikat, yaitu Los Angeles, Miami, New York ke Havana. Semenjak peristiwa Revolusi Kuba, banyak warga Kuba yang mencari perlindungan ke Amerika Serikat, khususnya di wilayah Florida. Disana mereka mendirikan Cuban American National Foundation (CANF) yang berperan dalam menjembatani hubungan kedua negara.¹⁴ Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Barack Obama, mengindikasikan adanya upaya normalisasi. Sebagaimana yang dijelaskan Barston bahwa untuk mencapai normalisasi hubungan, ada tiga indikator yang harus dipenuhi yaitu: aktor yang berkonflik mendeklarasikan akan adanya kesepakatan untuk melakukan proses normalisasi, kesepakatan itu mengurangi atau menghilangkan ketegangan yang berlangsung antar aktor, dan kemudian adanya penghapusan batasan ataupun kebijakan yang dianggap sebagai variable-variabel pemicu konflik.¹⁵

Sementara itu, pemimpin baru Kuba, Raul Castro, juga mengisyaratkan keterbukaan untuk reformasi negaranya. Menghadapi populasi usia tua yang cukup tinggi, beban utang luar negeri yang besar, dan kesulitan ekonomi pasca krisis ekonomi 2008. Raul Castro mulai menerapkan beberapa penyesuaian dan meliberalisasi beberapa sektor ekonomi yang dikendalikan negara.¹⁶ Disisi lain terdapat peran Vatikan yang terlibat dalam menjembatani negosiasi antara kedua

¹⁴ Gary Prevost, "The Obama Administration and Cuba: The Clinton Administration Revisited". *International Journal of Cuban Studies*, Vol. 3

¹⁵ Robert P. Barston, *Modern Diplomacy 4th Edition*. Routledge. London. (2013)

¹⁶ Claire Felter, Danielle Renwick, dan Rocio Cara Labrador. "U.S.-Cuba Relations", *Council on Foreign Policy*. <https://www.cfr.org/backgrounders/us-cuba-relations> (Diakses pada 20 April 2019)

negara dalam proses mencapai perdamaian. Paus Fransiscus menyurati kedua kepala negara yang berisi dukungan untuk menghentikan segera konflik yang berlangsung cukup lama tersebut. Lalu secara mengejutkan pada tanggal 17 Desember 2014, Barack Obama dan Raul Castro mengumumkan telah tercapai kesepakatan untuk memulai normalisasi hubungan diplomatik antara keduanya. Hal tersebut disambut positif oleh dunia internasional karena dengan kesepakatan tersebut diharapkan akan menghentikan konflik yang telah berlangsung terlalu lama antara keduanya dan juga mengakhiri embargo terhadap Kuba. Menindaklanjuti kesepakatan tersebut itu, John Kerry, melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez. Dalam kesempatan tersebut Kerry menyampaikan bahwa “Dia percaya Kuba akan menjadi negara yang lebih baik jika menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahannya”.¹⁷

Kemudian di tahun 2015 disela waktu KTT Amerika di Panama, Barack Obama melakukan dialog langsung dengan Raul Castro mengenai proses normalisasi hubungan kedua negara. Hasil dari pertemuan tersebut, tanggal 25 Mei 2015 Pemerintahan Barack Obama mengeluarkan kebijakan untuk menghapus Kuba dari daftar negara sponsor aksi terorisme. Reversan kebijakan Obama dalam upaya normalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba lalu direalisasikan oleh Pemerintahan Barack Obama dengan mengeluarkan kebijakan untuk membuka kembali kedutaannya di Havana pada 25 Juli 2015. Begitu pun sebaliknya, Kuba juga kembali membuka kedutaannya di Washington D.C.¹⁸

¹⁷ Pamela Dockins, “US, Cuba to Eye 'Full Normalization' of Relations.” VOA. <https://www.voanews.com/a/kerry-raises-flag-over-em/2917846.html> (Diakses 24 April 2019)

¹⁸ Elsada Diana Cassells, “Cuba-United States Relations in the Age of Obama”, *Al Jazeera Center for Studies*

1.2 Rumusan Masalah

Amerika Serikat melakukan pemutusan hubungan diplomatik pada tahun 1961 sebagai respon dari kebijakan nasionalisasi aset dan properti dengan status tanpa kompensasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Fidel Castro pasca terjadinya revolusi Kuba. Setelah pemutusan hubungan diplomatik tersebut, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Amerika Serikat cenderung berupa sanksi dan belum ada upaya yang menunjukkan normalisasi hubungan.¹⁹ Namun pada era Pemerintahan Barack Obama, Amerika Serikat mengumumkan akan adanya upaya normalisasi hubungan diplomatik yang kemudian direalisasikan pada 25 Juli 2015. Meskipun menurut The Economist dalam index democracy report menyebutkan bahwa Kuba masih tergolong pada negara yang masih otoriter dengan sistem sosialis.²⁰ Kemudian Pemerintah Kuba juga belum mau membicarakan mengenai aset Amerika Serikat yang di nasionalisasi pasca terjadinya revolusi.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti mencoba menganalisis alasan Amerika Serikat melakukan normalisasi hubungan diplomatik di era Pemerintahan Barack Obama.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah,” *Mengapa Amerika*

¹⁹ Margaret E. Crahan and Soraya M. Castro Mariño, *Cuba-US Relations: Normalization and Its Challenges*. Institute of Latin American Studies Columbia University

²⁰ The Economist,” Democracy Index 2014, Democracy and its discontents: A report from The Economist Intelligence Unit”. *The Economist*. (2014)

Serikat melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba di era Pemerintahan Barack Obama??".

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba pada masa Pemerintahan Barack Obama.

1.5 Manfaat Penelitian

- Melalui Penelitian ini, peneliti berharap dapat menjelaskan alasan perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba pada masa Pemerintahan Barack Obama.
- Peneliti juga berharap dapat menjelaskan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan dinamikanya dengan Kuba.
- Penelitian ini secara praktis akan menambah referensi kepustakaan ilmu hubungan internasional terkait kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

1.6 Studi Pustaka

Studi Pustaka digunakan untuk membandingkan penelitian terdahulu yang sebelumnya telah dilakukan. Sehingga dapat menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Tujuan pencantuman Studi Pustaka dimaksudkan untuk menemukan kebaruan dari penelitian penulis terhadap penelitian sebelumnya yang tema atau permasalahannya relatif sama. Selain itu, Studi Pustaka juga berguna bagi



penulis untuk menentukan fokus arah penelitian dan sudut pandang yang digunakan. Oleh sebab itu, peneliti akan menjelaskan secara singkat dan jelas dari beberapa bahan bacaan, seperti buku, buku elektronik, jurnal, artikel, dan bahan bacaan ilmiah lainnya.

Pertama, kajian pustaka dari Elsada Diana Cassells dalam tulisan yang berjudul, “*Cuba-United States Relations in the Age of Obama*”.²¹ Tulisan ini mengeksplorasi implikasi dari kebijakan Obama dalam upaya normalisasi hubungan dengan Kuba. Implikasi dari kebijakan tersebut berdampak pada ekonomi Kuba. Bagi Kuba, normalisasi hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat membawa perubahan terhadap perekonomiannya. Kuba akan mendapatkan akses modal dari investor Amerika Serikat untuk meningkatkan pembangunan di sektor pariwisata, pertanian dan agribisnis. Kemudian implikasi kedua, memberi Kuba peluang untuk terlibat dalam penelitian dan pengembangan yang diperlukan untuk memodernisasi infrastruktur yang akan diperlukan untuk menghasilkan peningkatan efisiensi dan produktivitas. Beberapa industri Kuba berkinerja di bawah kapasitas karena tidak adanya kapasitas infrastruktur untuk memfasilitasi inovasi. Kuba merupakan salah satu negara dengan tingkat penetrasi teknologi informasi dan komunikasi terendah di dunia. Ini adalah akibat langsung dari embargo AS yang melarang ekspor teknologi komputer ke Kuba. Karena banyak dari industri yang berkinerja buruk pada awalnya dibangun dengan teknologi dari AS, ini memberikan peluang industri untuk mengimpor *spare part* dari Amerika Serikat.

²¹ Elsada Diana Cassells, “Cuba-United States Relations in the Age of Obama”, *Al Jazeera Center for Studies*.

Kemudian tulisan kedua dari Ted Piccone yang berjudul, ” *U.S.-Cuba Normalization: U.S. Constituencies for Change*”.²² Tulisan ini menjelaskan bagaimana Obama menggaet masyarakat Amerika Serikat untuk melihat sisi lain dari Kuba. Akibat dari embargo yang diterapkan oleh pemerintahan sebelumnya membuat akses masyarakat Kuba terhambat. Untuk itu Obama meminta kongres untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut dengan tujuan mengurangi bahkan menghilangkan embargo terhadap Kuba. Upaya yang dilakukan oleh Obama untuk normalisasi hubungan dengan Kuba juga didukung oleh beberapa kelompok seperti: kelompok bisnis dan *travelling*, lembaga *Think Tank* dan filantropi, akademisi yang ingin melakukan pertukaran pelajar, kelompok agama yang terinspirasi dari seruan dari Petinggi Vatikan mengenai penyatuan religiusitas keluarga yang terpisah akibat konflik. Salah satu kelompok yang mendorong seruan untuk normalisasi dengan Kuba adalah komunitas bisnis Amerika Serikat. Setidaknya ada tiga komoditas utama yaitu industri pertanian, industri perjalanan dan perhotelan; dan sektor telekomunikasi dan internet. Perusahaan di bidang kesehatan dan obat-obatan, bahan konstruksi dan layanan profesional juga ikut mendorong adanya normalisasi, meskipun lebih sebagai pemain sekunder.

Kemudian tulisan ketiga dari Sujatha Fernandes yang berjudul “*Obama and the Future of US-Cuba Relations*”.²³ Dalam tulisan ini menjelaskan bahwa dalam kebijakan normalisasi dengan Kuba yang dikeluarkan pada tahun 2015, ternyata sebelumnya Obama perlu menanggapi banyak permintaan pada saat yang bersamaan, termasuk permintaan lobi anti-Kuba di dalam negeri. Kemudian tulisan

²² Ted Piccone, “U.S.-Cuba Normalization: U.S. Constituencies for Change”, *IdeAs d’ Ameriques*

²³ Sujatha Fernandes, “Obama and the Future of US-Cuba Relations”, *Economic and Political Weekly*, Vol. 44

ini juga berbicara bagaimana prospek hubungan luar negeri Amerika Serikat terhadap Amerika Latin. Semua berawal ketika pada saat debat pilpres dengan Hillary Clinton, Obama menyampaikan jika ia terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat akan melakukan usaha untuk menjalin komunikasi dengan Presiden Kuba, Raul Castro. Kemudian ketika disinggung mengenai kebijakan embargo, Obama menyampaikan bahwa dia menaruh karsinya untuk menghapusnya namun itu tergantung bagaimana kongres merespon dan memformulasikan kebijakan nantinya. Setelah terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-44, Obama memulai komunikasi dengan Raul Castro, dengan mengirimkan *the Congressional Black Caucus*, ini merupakan kebijakan pertama Amerika Serikat dalam mengirimkan delegasi ke Kuba dalam beberapa dekade terakhir. Dimana dari hasil kesepakatan tersebut mengenai pertukaran pelajar, obat-obatan dan bio-teknologi. Kemudian kunjungan tersebut di kritik oleh pihak oposisi karena dianggap tidak mewakili masyarakat Amerika Serikat dalam melakukan kunjungan resmi.

Tulisan selanjutnya dari Kevin J. Fandl yang berjudul *“Trading with the Enemy: Opening the Door to U.S. Investment in Cuba”*.²⁴ Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Kuba telah diberlakukan selama hampir tujuh dekade. Tujuan dari sanksi-sanksi tersebut untuk mengembalikan demokrasi dan kebebasan ke Kuba, terlepas dari kenyataan bahwa rezim Castro tetap berkuasa dengan dukungan publik Kuba yang luas. Keamanan pangan dan rendahnya angka pendidikan membayangi masyarakat Kuba pasca diterapkan sanksi-sanksi tersebut oleh Amerika Serikat. Sebagai salah satu jalan pintas yang diambil oleh pemuda Kuba adalah dengan memilih untuk melanjutkan

²⁴ Kevin J. Fandl, *Trading with the Enemy: Opening the Door to U.S. Investment in Cuba*, *Legal Studies and Strategic Global Management*, Temple University.

sekolah ke luar negeri, khususnya Amerika Serikat. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang “bermurah hati” terhadap masyarakat Kuba yang ingin melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat. Perubahan nyata terhadap domestic Kuba hanya akan terjadi jika Amerika Serikat mengizinkan Kuba terlibat kembali dengan pasar global dan menghapus sanksi-sanksi yang diterapkan Amerika Serikat. Askinus (2014) jaminan reformasi politik, pembangunan ekonomi berkorelasi dengan permintaan untuk perubahan politik, memberikan pendekatan pembangunan ekonomi lebih potensial daripada sanksi ekonomi yang gagal. Dalam jurnal singkat itu, Kevin J. Fandl juga berpendapat bahwa keadaan domestik akan membaik jika pemerintah Kuba bersedia melakukan penyesuaian sistem sosialisnya dengan dunia internasional layaknya negara Tiongkok saat ini. Dengan melakukan perbaikan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat bisa memberi kesempatan kepada Kuba untuk menjadi negara “rising” dengan bantuan Amerika Serikat layaknya masa lalu atau memberikan opsi lain dengan tetap mempertahankan nilai-nilai sosialis seperti yang berhasil diterapkan Tiongkok.

Tulisan terakhir dari Alessandro Badella yang berjudul “American: US Democracy Promotion in Cuba after the Cold War”²⁵ Tulisan ini membahas pentingnya promosi demokrasi terhadap Kuba sebagai agenda politik internal Amerika Serikat. Dalam beberapa dekade terakhir, promosi demokrasi yang dilakukan Amerika Serikat telah menerima kritik dari komunitas akademik dan pembuat kebijakan baik dari dalam ataupun luar. Respon terhadap promosi demokrasi, konsekuensi yang tidak diinginkan dari bantuan demokrasi di negara-

²⁵ Alessandro Badella, “American: US Democracy Promotion in Cuba after the Cold War”. *International Journal of Cuban Studies* Vol.5. 2015

negara berkembang dan sulitnya memprediksi hasil promosi demokrasi di negara transisi' mengakibatkan ketidakstabilan politik di negara tersebut sehingga memunculkan ancaman baru bagi keamanan Amerika Serikat. Untuk Kuba, kebijakan embargo yang diterapkan Amerika Serikat memiliki tujuan utama 'mendemokratisasikan' negara tersebut.

Dari kelima studi pustaka diatas, memiliki kontribusi dalam penyusunan latar belakang penelitian dan membantu penulis dalam menganalisis untuk bab 3 mengenai sejarah dan dinamika hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Kuba. Yang menjadi pembeda antara kelima studi pustaka diatas dengan penelitian ini adalah peneliti lebih berfokus kepada analisis alasan Amerika Serikat melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba di Era Pemerintahan Obama melalui 4 variabel dari konsep *foreign policy change* dari Charles F. Hermann..

1.7. Kerangka Konseptual

1.7.1. Perubahan Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy Change*)

Secara konseptual, kebijakan luar negeri dipahami sebagai tindakan otoritatif yang diambil atau dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga aspek yang diinginkan dari lingkungan internasional atau mengubah aspek yang tidak diinginkan dengan perhitungan yang tepat dan orientasi tujuan yang jelas untuk memecahkan masalah atau mempromosikan beberapa perubahan dalam lingkungan internasional. Dalam bentuknya yang paling sederhana, kebijakan luar negeri terdiri



dari pernyataan dan tindakan yang diambil oleh subyek negara untuk hubungannya dengan aktor internasional yaitu negara atau aktor non-negara.²⁶

Menurut Duncan, tujuan dari kebijakan luar negeri suatu negara dapat dijelaskan dalam bentuk “hirarki” dan dibentuk oleh sekelompok aktor yang memiliki kewenangan dan pengaruh dalam merumuskan kebijakan luar negeri suatu negara. Hirarki tujuan kebijakan luar negeri tersebut yaitu *core objectives*, *middle-range objectives* dan *long-range objectives*. *Core objectives* merujuk pada tujuan kebijakan luar negeri yang berusaha untuk mencapai kepentingan vital, yaitu sektor keamanan teritorial, sektor kekuatan ekonomi, dan ketergantungan politik. kemudian, *middle-range objectives* dimana negara tetap menjadi *core objectives* sebagai tujuan utama namun juga mengejar tujuan jangka menengah yang dapat meningkatkan prestise mereka dalam sistem internasional dengan terlibat dalam organisasi internasional, pertukaran budaya, mensponsori konferensi dan pertemuan para kepala negara, menjelajahi luar angkasa atau dengan bertukar delegasi diplomatik dengan negara-negara yang menjadi tujuan kebijakan luar negerinya. Dan yang terakhir, *long-range objectives*, dimana merujuk pada promosi nilai dan norma-norma dasar yang dipercayai oleh suatu negara untuk disebarluaskan ke dunia internasional. Hal ini dapat terlihat jelas dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat pasca Perang Dingin menjadikan HAM, demokrasi dan pasar bebas sebagai *long-range objectives*-nya.²⁷

Kebijakan luar negeri suatu negara merupakan bentuk representasi sikap yang menggambarkan respon terhadap suatu isu yang terjadi dalam dunia

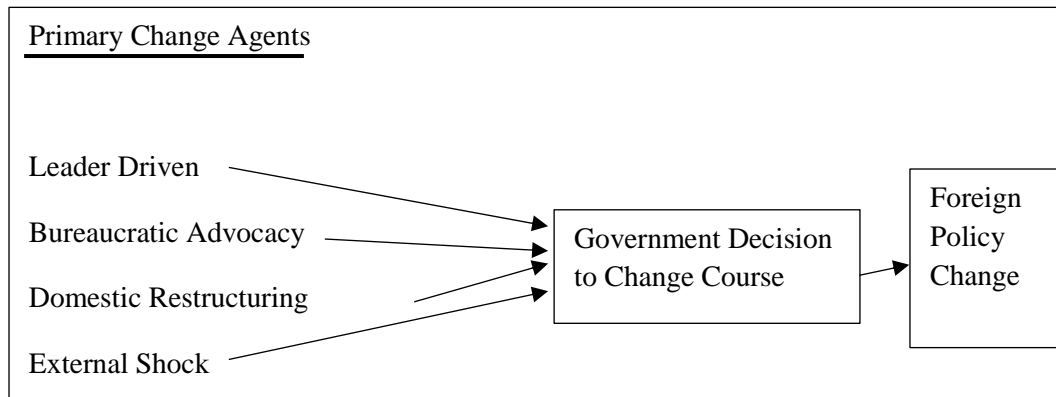
²⁶ John Barkdull dan Paul Harris, *Environmental Change and Foreign Policy: A Survey of Theory, Global Environmental Politics*.

²⁷ W. Raymond Duncan, Barbara Jancar-Webster, dan Bob Switky, *World Politics in the 21st Century*. New York: Longman.2006

internasional, yang tidak bersifat statis namun kebijakan luar negeri bersifat dinamis atau menyesuaikan dengan beberapa pertimbangan berdasarkan tujuan pemerintah suatu negara saat itu. Disebabkan oleh kebijakan luar negeri yang bersifat dinamis, maka untuk mengetahui mengapa kebijakan luar negeri suatu negara dapat berubah diperlukan beberapa elemen atau faktor yang dapat dianalisis sehingga mendapatkan jawaban atas pertanyaan mengapa di belakang perubahan kebijakan tersebut. Maka perubahan kebijakan luar negeri dapat diartikan sebagai pergeseran, reorientasi, atau restrukturisasi kebijakan suatu negara dalam menjalankan hubungan luar negerinya.

Sedangkan bagi Charles F. Hermann menggunakan “*redirection*” dalam menerjemahkan perubahan kebijakan luar negeri. Perubahan arah tersebut biasanya terjadi pada pemerintahan yang baru dilantik yang memiliki pandangan sendiri terhadap lingkungan internasional dan sebagai agenda baru dalam kebijakan luar negerinya. Di karenakan sifatnya yang dinamis dan fleksibel, perubahan kebijakan luar negeri tersebut selalu menyesuaikan dengan adanya *input* dan *output* dalam perumusan kebijakan luar negeri. Selain itu beberapa entitas juga ikut menjadi alasan kenapa sebuah kebijakan luar negeri dapat berubah. Untuk itu, dalam menganalisis perubahan kebijakan luar negeri, peneliti merujuk pada konsep *foreign policy change* dari Charles F. Hermann yang menjelaskan bahwa terdapat empat aktor/agen yang menyebabkan perubahan kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu:²⁸

²⁸ Charles F. Herman, “Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy”, *International Studies Quarterly*, Vol. 34.



Sumber: Hermann, 1990.

Gambar 1.1 Bagan Konsep *Foreign Policy Change*

a. *Leader Driven*

Perubahan kebijakan luar negeri yang disebabkan adanya visi-misi dari pemimpin suatu negara yang kemudian diterapkan kedalam kebijakan luar negerinya karena hal tersebut dianggap perlu dilakukan untuk mengubah kebijakan sebelumnya yang dianggap tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang. Hermann menggunakan istilah *reconceptualization* untuk menggambarkan perubahan cara pandang seorang pemimpin dalam merespon sebuah isu. Pandangan tersebut berasal dari keyakinan dan nilai yang dianut dan telah ada baik sebelum ataupun ketika menjabat sebagai seorang pemimpin negara.

Menurut Hermann, ada tiga nilai yang menyebabkan seorang pemimpin negara bisa memorientasi kebijakan luar negerinya yaitu *conviction*, *energy* dan *power*. *Conviction* (keyakinan) yang berarti ada suatu *strong belief on the part of leader* yang telah lama diyakininya dan tidak perlu pembuktian lebih lanjut mengenai keyakinan tersebut. Dalam kasus ini, dapat dijelaskan bahwa Pemerintahan Barack Obama memiliki keyakinan bahwa pemutusan hubungan diplomatik disertai penjatuhan hukuman embargo terhadap Kuba merupakan kebijakan yang *outdated* sehingga tidak relevan lagi untuk diterapkan pada

pemerintahannya. Kebijakan untuk mengisolir Kuba dari dunia internasional semenjak tahun 1960-an dianggap sudah lebih dari cukup untuk memberikan dampak buruk terhadap domestik Kuba.²⁹

Kemudian *Energy* (energi), Hermann menjelaskan bahwa keinginan yang kuat harus dimiliki oleh seorang pemimpin sebagai bagian dari usaha untuk melakukan perubahan kebijakan. Pemimpin tersebut juga memperlihatkan upaya dan pendekatan yang berbeda dalam menangani sebuah kasus. Upaya dan pendekatan tersebut akan terlihat diawal masa pemerintahannya. Sehingga seorang pemimpin dianggap mempunyai energi ketika telah melakukan upaya dan pendekatan sebelum melakukan perubahan kebijakan dan bersiap menghadapi perlawanan dan kehilangan kredibilitas yang biasanya berasal dari pihak oposisi.³⁰ Sebelum Barack Obama dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat di tahun 2009, dalam masa kampanyenya, Obama menyampaikan bahwa normalisasi hubungan dengan Kuba akan menjadi salah satu prioritas kebijakan yang diambilnya dimasa awal pemerintahannya nanti. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa penggunaan diplomasi yang “agresif” akan menjadi kunci utama dalam mempromosikan demokrasi di Kuba. Kemudian di masa awal dengan Hillary Clinton, Obama juga menyampaikan bahwa Amerika Serikat perlu untuk melakukan pembicaraan dengan Pemerintah Kuba mengenai hubungan kedua



²⁹ Julie Hirschfeld Davis, “Obama, Cementing New Ties with Cuba, Lifts Limits on Cigars and Rum, *The New York Times*”. <https://www.nytimes.com/2016/10/15/world/americas/obama-cuba-trade-embargo.html> (Diakses pada 24 Februari 2019)

³⁰ Fredrik Doerer, “Leader-driven foreign-policy change: Denmark and the Persian Gulf War”. *International Political Science*. Sage Journal

negara. Selain itu dorongan dari negara-negara Amerika Latin dan PBB untuk mencabut sanksi terhadap Kuba juga harus diperhitungkan.³¹

Lalu *Power* (kekuatan), dijelaskan oleh Hermann sebagai kemampuan dan pengalaman pemimpin dalam menjabat sebagai seorang kepala negara termasuk pemimpin tersebut berasal dari partai atau koalisi mana. Kemampuan seorang pemimpin dalam menjelaskan suatu isu terhadap oposisi partai dan perwakilan rakyat juga menjadi bagian *power* yang dimiliki seorang pemimpin. Barack Obama menjabat semenjak tahun 2009 dan menjalani dua masa periode pemerintahan. Di awal kebijakannya dalam upaya normalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba, terdapat penolakan dari pihak oposisi, yaitu Partai Republik. Dikutip data dari Gallup Poll, 72% dari pihak Partai Demokrat mendukung adanya normalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba, sedangkan dari pihak oposisi hanya 32%. Tantangan semakin terlihat ketika di 2 tahun terakhir periode pertama Obama menjabat, legislatif dikuasai oleh Partai Republik sehingga beberapa kebijakan Obama dalam upaya normalisasi hubungan mengalami hambatan.³²

b. *Bureaucratic Advocacy*

Bureaucratic Advocacy merupakan entitas yang berasal dari dalam pemerintahan suatu negara yang terlibat dalam pemberi pandangan, pilihan kebijakan dan mendukung adanya penyesuaian dalam kebijakan luar negeri yang dilakukan pemimpin suatu negara. Menurut Hermann, kelompok ini berada dalam lingkaran eksekutif yang bersentuhan langsung dengan urusan luar negeri suatu

³¹ Piot Lacinski, "Normalization of US-Cuban Relations: Obama Doctrine and International Security in the Western Hemisphere". *Collegium Civitas and the European Association for Security*.

³² Andrew Dugan, "Americans on Cuba: for Normalized Relations, but Party Divide Exists". *GALLUP*. <https://news.gallup.com/opinion/polling-matters/180239/americans-cuba-normalized-relations-party-divide-exists.aspx> (Diakses pada 1 Maret 2019)

negara. Kelompok ini justru dianggap lebih mampu untuk mengadvokasi *decision-maker* mengenai efektif tidaknya implementasi sebuah kebijakan.

Kemudian dalam tulisan ini *Bureaucratic Advocacy* merujuk kepada Department of State Amerika Serikat. Dimana kementerian ini bekerja sebagai ujung tombak diplomasi dan negosiasi Amerika Serikat untuk dunia internasional. Dalam struktur kementerian ini terdapat divisi yang mengurus seluruh kebijakan yang berkaitan bilateral dan regional Amerika Serikat untuk Amerika Latin, yaitu Western Hemisphere Affairs (WHA). Sehingga divisi ini merupakan kelompok yang bertanggung jawab dalam isu normalisasi diplomatik Kuba dan Amerika Serikat.

c. Domestic Restructuring

Merupakan kelompok masyarakat yang melek terhadap suatu isu, baik domestik ataupun internasional. Kelompok ini juga bisa menjadi agen ataupun target dari kebijakan pemerintah sehingga dalam prosesnya nanti, suara ataupun pandangan mereka dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan perubahan kebijakan sesuai dengan *input* yang masuk kepada pemerintah. Kelompok ini juga bisa memiliki pengaruh dalam menanggapi suatu isu sehingga pandangan mereka dijadikan pertimbangan sebagai generalisasi bagaimana masyarakat dalam memandang suatu isu. Hal ini biasanya dibuktikan dengan jejak pendapat, *polling* ataupun metode sejenis. Dalam penelitian ini kelompok *Domestic Restructuring* mengacu pada masyarakat *American-Cuban* khususnya yang berada di wilayah Florida. Mereka ini merupakan warga Kuba ataupun yang masih memiliki kekerabatan, dimana ketika terjadi peristiwa Revolusi



Kuba, mereka melarikan diri dan kemudian menetap di Amerika Serikat. Dengan kata lain mereka merupakan orang-orang yang mendukung Pemerintahan Batista.

Masyarakat *American-Cuban* menjadi jembatan penghubung antara Amerika Serikat dengan Kuba, salah satu bentuk nyatanya yaitu ketika Barack Obama dalam sesi debat kandidat presiden, mengeluarkan pernyataan bahwa akan melakukan upaya normalisasi dengan Kuba. Kemudian muncul dukungan dari masyarakat ini bahwa meskipun Kuba masih dikuasai oleh rezim Castro namun dengan melakukan normalisasi akan membuat komunikasi dan transportasi antara mereka yang tinggal di Amerika Serikat dan Kuba lebih mudah. Jika dilihat komposisi masyarakat di Negara Bagian Florida, terdapat setidaknya 68% masyarakat *Cuban-American*, khususnya di wilayah Miami yang mana dikenal sebagai kota dengan basis ekonomi bergantung pada pariwisata dan keuangan dengan wilayah Amerika Latin. Dengan jumlah komposisi 68% tersebut membuat kelompok ini memiliki pengaruh terhadap perpolitikan khususnya di Florida. Misalnya di Era Pemerintahan Ronald Reagan, kelompok masyarakat ini membentuk the Cuban American National Foundation (CANF) yang menjadi gerakan penolakan terhadap revolusi Kuba.

d. *External shock*
UNTUK

KEDJAJAAN

BANGSA

Merupakan peristiwa, kejadian dan dorongan/tuntutan yang berasal dari luar wilayah teritorial suatu negara yang kemudian menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan bagi pemerintah untuk merubah kebijakan luar negerinya. Peristiwa tersebut dapat memicu pemimpin untuk mengambil tindakan yang drastis atau memicu segmen-segmen masyarakat tertentu untuk menekan pemerintah melalui tuntutan agar pemerintah mempertimbangkan hal yang terjadi di luar sana sehingga

akan diharapkan terjadi sebuah tindakan melakukan perubahan kebijakan. Sehingga domestik maupun eksternal memiliki pengaruhnya masing-masing dalam menyebabkan perubahan kebijakan luar negeri dan kepala pemerintahan harus berusaha menyeimbangkan antara tuntutan internal dan tekanan yang diberikan dunia internasional.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak menemukan variabel yang terindikasi sebagai bagian dari *external shocks* yang menjadi penyebab Pemerintahan Amerika Serikat melakukan perubahan kebijakan dalam konteks normalisasi dengan Kuba di Era Pemerintahan Barack Obama. Sehingga peneliti menggunakan indikator alternatif yaitu faktor eksternal sebagai bagian dari alat analisis untuk menemukan jawaban dari penelitian ini yaitu diplomasi dari Vatikan, dorongan dari negara-negara Amerika Latin dan Pergantian Rezim Castro. Diplomasi Vatikan (*faith-based diplomacy*) menurut Louise Diamond dan John Mc Donald, merupakan sebuah diplomasi yang mengedepankan atribut-atribut religi sebagai cara untuk mencapai perdamaian dunia. Dalam hal ini peran dari para tokoh agama, tahta suci, dan komunitas-komunitas religius menjadi agen sebagai penghubung antara pihak yang bertikai atas nama kesepahaman dalam memahami konsep perdamaian, anti kekerasan dan percaya bahwa resolusi konflik merupakan jalan yang benar dalam menyelesaikan pertikaian. Kemudian adanya muncul dorongan dari negara-negara Amerika Latin sebagai bentuk penguatan kerjasama dan solidaritas di kawasan tersebut. Lalu perubahan rezim yang terjadi pada tahun 2008 dari Pemerintahan Fidel Castro ke Pemerintahan Raul Castro.



1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan mengkaji lebih dalam mengenai hubungan antar variabel yang ada dalam penelitian. Implementasi dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan konsep *foreign policy change* untuk menjawab mengapa Amerika Serikat melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba.

1.8.2. Batasan Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukan batasan masalah agar penelitian penelitian yang akan diteliti dapat dipersempit. Sehingga, hasil penelitian akan koheren dengan latar belakang serta rumusan masalah. Batasan masalah juga dimaksudkan agar konsistensi penulis dapat terjaga agar tulisan tidak melebar

Batasan waktu dalam penelitian ini difokuskan pada tahun 2009-2015. Pada tahun 2009 dimulai awal Pemerintahan Barack Obama dan pada tahun 2015 kedutaan Amerika Serikat di Havana kembali dibuka. Batasan masalah berfokus kepada apa yang menjadi alasan Amerika Serikat dalam melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba setelah lebih dari setengah abad hubungan kedua negara terputus. Lalu pada tanggal 20 Juli 2015, kedua negara kembali menjalin hubungan diplomatik dengan membuka kembali kedutaannya. Diawali dengan Amerika Serikat membuka kedutaan di Havana, dan diikuti oleh Kuba dengan membuka kedutaannya di Washington D.C.



1.8.3. Unit dan Level Analisis

Unit analisis artikan sebagai objek yang perilakunya hendak diteliti atau disebut juga dengan variabel dependen. Kemudian terdapat unit eksplanasi yaitu objek yang mempengaruhi perilaku unit analisis yang digunakan. Dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah normalisasi hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Kuba. Sementara itu, faktor yang menjadi alasan perubahan kebijakan Barack Obama. Kemudian untuk level analisis sendiri merupakan entitas sosial spesifik yang menjadi target dalam sebuah penelitian. Sehingga merujuk pada latar belakang dan konsep yang digunakan, peneliti menggunakan level sistem internasional dalam menganalisis penelitian ini, karena dalam penelitian ini terdapat banyak aktor yang terlibat baik dalam konteks individu, negara, dan kelompok.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penelitian ini adalah *secondary data*. *Secondary data* yaitu data yang dikumpulkan dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian tersebut.³³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data primer yang berasal dari situs resmi Pemerintahan Amerika Serikat seperti www.state.gov, www.whitehouse.gov, www.intelligence.gov, www.cia.gov, www.govinfo.gov dan data-data lain dari situs pemerintahan lainnya. Lalu ada data sekunder yaitu berupa buku (cetak dan online), situs berita dan artikel seperti CNN, TIME, New York Times, BBC, e-ir, dan juga sumber data yang lainnya yang berkaitan dengan

³³ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Edisi Ketiga Bandung: Pustaka Pelajar. (2012).

hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Kuba khususnya di era Pemerintahan Obama.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan identifikasi dan pencarian pola-pola umum hubungan dalam kelompok data, yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.³⁴ Analisis data ini akan sangat penulis butuhkan dalam penelitian ini dikarenakan data yang diperoleh dalam penelitian ini akan sangat banyak. Banyaknya data yang terkumpul mengakibatkan banyaknya varietas data. Kemudian dari data yang dikumpulkan dikategorisasikan berdasarkan kata kunci dan topik dalam penelitian ini seperti: Barack Obama, Kuba, normalisasi hubungan diplomatik, kebijakan luar negeri, dan Amerika Serikat. Kemudian data tersebut juga didukung dengan data sekunder yang menguatkan fakta dalam tulisan ini melalui angka statistik dipaparkan dengan dengan data tabel dan gambar.

Tahap penelitian diawali dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai bagaimana struktur dan siapa saja aktor yang terlibat dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang sejarah dan dinamika hubungan diplomatik Amerika Serikat dan Kuba dimulai di era Pemerintahan Eisenhower, John F. Kennedy, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton dan kemudian Barack Obama. Ke enam Pemerintahan Amerika Serikat tersebut menjadi pembahasan penelitian karena mereka memberikan perhatian khusus dalam kebijakan luar negerinya terhadap Kuba. Lalu melalui konsep *Foreign Policy Changes* dari Charles F. Herman digunakan penulis untuk menganalisis alasan perubahan kebijakan luar negeri

³⁴ Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research*, California: Sage Publications Inc. 1999

Amerika Serikat di Era Pemerintahan Obama dengan melakukan normalisasi hubungan diplomatik terhadap Kuba. Konsep tersebut memiliki 4 indikator yang digunakan untuk menganalisis perubahan tersebut yaitu: *leader driven*, *bureaucratic advocacy*, *external shock*, dan *domestic restructuring*.

1.9. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang akan menggambarkan fakta-fakta penting mengenai isu yang penulis angkat, selanjutnya terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual serta metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Pendahuluan akan memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang akan diteliti.

BAB II Struktur dan Pola Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

Bab ini menjelaskan bagaimana struktur dan pola kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dimana dalam perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terdapat struktur yang terbagi pada *presidential preeminent*, *foreign policy bureaucracy*, dan *Congress*. Ketiga struktur tersebut menjadi aktor vital dalam perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kemudian jika dilihat dari pola dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat terdapat 3 pembagian periodisasi, yaitu isolanisme, imperialisme dan ekspansisme di tahun 1876-1941. Lalu Anti-Komunisme dan Global Aktivism di tahun 1946-1989. Dan terakhir di tahun 1990-2008 yaitu Bush Doctrine.



BAB III Hubungan Diplomatik Amerika Serikat dengan Kuba.

Bab ini menjelaskan bagaimana dinamika hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Kuba dimulai pada masa Pemerintahan John F. Kennedy dengan Kebijakan Invasi Teluk Babi dan Krisis Misil Kuba, Pemerintahan Ronald Reagan dengan Kebijakan Memasukkan Kuba ke dalam *List State Sponsors of Terrorism*, Pemerintahan George W. Bush dengan Kebijakan *The Cuban Democracy Act*, Pemerintahan Bill Clinton dengan Kebijakan *The Helms-Burton Act* dan Kebijakan Normalisasi Hubungan Diplomatik di Pemerintahan Barack Obama.

BAB IV Analisis Normalisasi Hubungan Diplomatik Amerika Serikat dengan Kuba di Era Pemerintahan Barack Obama

Bab ini akan menganalisis alasan Amerika Serikat melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba menggunakan konsep *foreign policy change* dari Charles F. Hermann dengan menggunakan 4 variabel: *leader driven*, *bureaucratic advocacy*, *domestic restructuring*, dan *external shock*.

BAB V Penutup

Bab ini berisikan ringkasan, saran dan kesimpulan dari hasil penelitian yang berdasarkan pertanyaan penelitian.

